

Penerapan Sistem Kepegawaian Perangkat Desa Melalui SIPEDE : Studi Desa Terungwetan, Kabupaten Sidoarjo

Dian Nur Cholidah ^{1*}; Ilmi Usrotin Choiriyah ²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia; diannurcholidah49@gmail.com; ilmiusrotin@umsida.ac.id

*Correspondence : diannurcholidah49@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan e-Government melalui Sistem Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE) di Desa TerungWetan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun 2022. Penelitian ini mengadopsi teori dari penelitian Harvard JFK School of Government yang diterapkan dalam buku karya (Indrajit, 2016) yang terdiri dari tiga elemen kunci, yaitu support, capacity, dan value. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan kesuksesan penerapan SIPEDE dalam Sistem Kepegawaian Perangkat Desa, dengan hasil seperti: 1) Adanya dukungan dan regulasi yang jelas, alokasi sumber daya, dan sosialisasi yang efektif kepada operator. 2) Terdapat kapasitas yang memadai, termasuk keuangan yang cukup, infrastruktur teknologi informasi yang lengkap, dan tenaga kerja yang kompeten. 3) Perangkat desa merasakan manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan kinerja mereka.

ABSTRACT

This research explores the implementation of e-Government through the Village Officials Employee Information System (SIPEDE) in TerungWetan Village to enhance the quality of public services in the year 2022. The study adopts the theory derived from the research conducted by the Harvard JFK School of Government, as applied in the work authored by (Indrajit, 2016), which comprises three key elements: support, capacity, and value. The research methodology utilized is qualitative, employing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. Informant selection was carried out through purposive sampling. The research findings demonstrate the success of implementing SIPEDE in the Village Officials Employee Information System. This is evidenced by: 1) Clear support and regulations, resource allocation, and effective operator awareness. 2) Adequate capacity, including sufficient financial resources, comprehensive information technology infrastructure, and competent personnel. 3) Village officials have experienced benefits, particularly in improving the efficiency and effectiveness of their performance reporting.

Kata kunci

e-Government, SIPEDE, Sistem Kepegawaian Perangkat Desa

Keywords

e-Government, SIPEDE, Village Official Personnel System

Pendahuluan

Informasi telah menjadi krusial seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, karena informasi memiliki nilai yang benar, akurat, cepat, dan tepat. Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan perusahaan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih sederhana, efisien, dan produktif. Semua lembaga telah mulai meluncurkan pembaruan dalam sistem TI yang sudah ada dan ini dapat dilakukan dengan mudah. Pentingnya dukungan dari kerangka penerapan informasi yang telah direncanakan secara jelas adalah untuk memudahkan proses penerapannya. Sesuai dengan (Jogiyanto, 2005) sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang memenuhi kebutuhan dalam mengelola pertukaran sehari-hari, menjalankan tugas dan aktivitas utama, serta menyediakan laporan penting kepada pihak eksternal. Pembangunan sistem informasi memerlukan integrasi komponen pendukung seperti pemrograman, perangkat keras, pengguna, informasi, dan metodologi (Ananda, 2023; Sudirman,2023).

Bidang digital digunakan untuk meningkatkan efisiensi, termasuk dalam digitalisasi komunikasi media, penyiaran, dan penyediaan informasi pemerintah. Sistem Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE) juga memegang peran penting dalam hal ini. SIPEDE didirikan pada tahun 2020 dan melibatkan pegawai sebagai salah satu sumber daya manusia yang bekerja di Pemerintahan Desa. Tugas utama mereka adalah menciptakan dan melaksanakan strategi sumber daya manusia lokal, yang menekankan pentingnya pengawasan dan pemeliharaan data yang akurat. Sistem Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE) juga memiliki peran penting dalam melayani seluruh staf. Pegawai atau perangkat desa merupakan komponen utama dalam tugas-tugas suatu organisasi yang harus diawasi dengan cermat. Secara umum, manajemen pegawai yang akurat dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja baik dalam bisnis maupun dalam pemerintahan secara keseluruhan, meskipun peningkatan kinerja pegawai dapat dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Sistem Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE) pada dasarnya berfungsi sebagai pendukung dan menyediakan data yang akurat mengenai pegawai. Pemanfaatan basis informasi ini memungkinkan pemantauan terhadap berbagai kebutuhan pegawai, seperti portabilitas, kemajuan, perpindahan, cuti, tingkat gaji, dan manfaat lainnya.

SIPEDE adalah alat yang mencakup pengelolaan Perangkat Desa termasuk data pribadi, keluarga, pendidikan, pelatihan, pekerjaan, pengalaman, tanda jasa atau penghargaan, organisasi, dan pelaporan. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh SIPEDE mencakup data mengenai unit kerja perangkat dan laporan BPJS. Beberapa perangkat yang ada dalam SIPEDE memiliki pusat data dan komunikasi yang khusus yang saling terhubung, memberikan rekomendasi, dan seringkali berinteraksi satu sama lain dalam upaya untuk menyediakan data terkait pekerjaan. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Daerah yang telah mengadopsi e-

Government dalam penyelenggaraan Pemerintahannya. Salah satu terobosan baru dalam implementasi e-Government di Kabupaten Sidoarjo adalah Sistem Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE), yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sidoarjo. Sistem ini memungkinkan Pemerintah Desa untuk menyampaikan informasi mengenai pegawai, melaporkan kinerja, dan melibatkan staf dalam pelaporan E-Kinerja.

Pemerintah Desa Terungwetan di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, adalah salah satu Desa yang telah mengadopsi Aplikasi SIPEDE untuk pengelolaan sistem informasi Perangkat Desa. Aplikasi ini dioperasikan oleh satu operator. Dalam pelaksanaannya, jika terjadi pergantian Perangkat Desa yang baru, kejadian kematian salah satu pegawai perangkat, atau pergantian Kepala Desa dari yang lama ke yang baru, semua perubahan data ini harus dimasukkan ke dalam database SIPEDE untuk pembaruan data yang tepat dan terbaru. Proses pembaruan data dalam SIPEDE memiliki dampak yang signifikan terhadap tunjangan, gaji, dan penilaian kinerja pegawai perangkat desa. Data yang akurat dan terkini dalam SIPEDE sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai perangkat desa menerima tunjangan yang seharusnya, gaji yang sesuai, dan evaluasi kinerja yang akurat. Jika nama pegawai perangkat desa tidak tercatat dengan benar dalam aplikasi SIPEDE, maka hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pemberian tunjangan, gaji, dan penilaian kinerja.

Sistem Informasi Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE) adalah terobosan terbaru dalam pengelolaan data perangkat desa yang dikembangkan oleh Dinas PMD. Desa Terungwetan di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengadopsi SIPEDE sebagai sistem informasi kepegawaian Perangkat Desa. Sebelum SIPEDE, pengelolaan data kepegawaian perangkat desa adalah tugas rumit yang memakan banyak waktu dan tenaga. Sebelum adanya SIPEDE, pemantauan kebutuhan dalam hal data kepegawaian perangkat desa dilakukan secara manual oleh Perangkat Desa dan pengelolaan data kepegawaian perangkat desa menggunakan format Excel dan dicetak dalam berkas fisik. Berkas tersebut dilaporkan langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setiap tiga bulan sekali dengan proses pelaporan manual yang memakan waktu lama. Perubahan dari sistem manual ke SIPEDE telah membawa efisiensi signifikan dalam manajemen data kepegawaian perangkat desa. Dalam sistem manual, pelaporan langsung ke Dinas PMD selama jam kerja dapat menghambat kinerja pegawai. Namun, dengan adopsi SIPEDE, Dinas PMD dapat memantau data kepegawaian perangkat desa melalui website, yang memungkinkan pengaksesan yang lebih mudah dan cepat. Selain itu, Dinas PMD tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan data kepegawaian yang diperlukan. Dengan SIPEDE, pelaporan hanya perlu dilakukan dengan melakukan pembaruan data pegawai setiap satu bulan sekali, tanpa perlu datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Proses pelaporan ini mencakup penyimpanan data pegawai ke dalam database yang tersedia. Hal ini telah

membawa perubahan positif dalam efisiensi dan manajemen data kepegawaian perangkat desa.

Namun, implementasi kebijakan pemerintah ini masih belum optimal di tingkat pemerintahan lokal, sehingga menghambat kemajuan e-Government sebagai tonggak utama pemerintahan. Penolakan terhadap perubahan merupakan salah satu halangan utama dalam upaya pengembangan e-Government, selain faktor-faktor lain seperti kepentingan sektoral yang berbeda, konteks informasi, kurangnya semangat untuk berintegrasi, keengganan untuk berbagi informasi, dan faktor-faktor lain yang turut berperan. Meskipun demikian, integrasi Teknologi Informasi dapat memberikan solusi bagi tantangan global dan menarik minat investor serta wisatawan untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Demikian pula, dalam konteks pemerintahan desa, sebagai entitas pemerintahan terbawah dalam struktur pemerintahan nasional, desa memiliki kewenangan otonom untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya. Oleh karena itu, penerapan konsep e-Government di pemerintahan desa dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan desa dalam upaya mencapai tujuan tersebut. (Watrianthos et al., 2019)

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memungkinkan e-Government Desa menjadi sarana pertanggungjawaban bagi pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang mandiri, transparan, dan akuntabel. E-Government dalam konteks pemerintahan desa bukan hanya sekedar tentang situs web desa, tetapi merupakan sistem yang terintegrasi melalui teknologi informasi, yang pada gilirannya akan membuat pemerintahan desa menjadi lebih efisien dan transparan sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa. Dukungan Teknologi Informasi dalam pemerintahan desa juga akan memfasilitasi penggunaan data tunggal yang selalu diperbarui oleh aparat desa. (Watrianthos et al., 2019)

Kendala dalam penerapan SIPEDE di Desa Terungwetan Kecamatan Krian termasuk fluktuasi data sumber daya manusia yang tinggi dan sifat dinamis dari data tersebut. Data sumber daya manusia (SDM) cenderung mengalami perubahan yang sering, kadang meningkat, dan kadang menurun seiring dengan berjalannya waktu serta kemajuan teknologi dan globalisasi. Kendala ini menciptakan tantangan dalam menjaga data SDM yang akurat dan terkini dalam SIPEDE. Pengelolaan perubahan data yang efisien dan pembaruan data yang cepat diperlukan untuk mengatasi kendala ini dan memastikan pengolahan data sumber daya manusia dengan optimal. Dengan mengatasi fluktuasi dan dinamika data SDM, SIPEDE dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam pengelolaan informasi sumber daya manusia di Desa Terungwetan Kecamatan Krian. Kendala dalam penerapan SIPEDE

di Desa Terungwetan Kecamatan Krian, juga melibatkan sifat dinamis data SDM yang membuat data pegawai kurang lengkap (up-to-date) sehingga kurang akurat dan valid. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pembaruan data secara teratur atau perubahan data yang tidak segera tercatat dalam SIPEDE.

Selain itu, meskipun ada dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan di bidang IT, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan pemrograman yang diperlukan untuk mengelola SIPEDE dengan optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut untuk memaksimalkan potensi staf yang sudah terlatih. Koordinasi antar-bidang di Desa Terungwetan yang belum maksimal juga merupakan kendala, terutama jika setiap bidang memiliki tugas pokok yang berbeda. Dalam konteks ini, perubahan struktur kelembagaan juga dapat berdampak pada nilai hukum data kepegawaian, yang menunjukkan perlunya penyesuaian regulasi atau pedoman yang berlaku. Dalam mengatasi kendala-kendala ini, perlu dilakukan upaya koordinasi yang lebih baik antar-bidang, pembaruan data yang rutin, pelatihan tambahan, dan penyesuaian hukum atau regulasi yang relevan.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sugeng et al., (2021), yang menunjukkan peningkatan kedisiplinan pegawai melalui implementasi program SI PERLU di Kabupaten Lumajang. Meskipun menggunakan metode kualitatif yang serupa, penelitian ini lebih menekankan pada penerapan sistem informasi kepegawaian perangkat desa. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh H (2021) menemukan bahwa penerapan sistem manajemen telah optimal berkat kapasitas kerja, motivasi, dan kepemimpinan yang kuat, serta dukungan dari pegawai. Penelitian ini membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya dengan fokus yang lebih tajam pada penerapan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja pegawai, khususnya di level perangkat desa. Sebagai tambahan, penelitian oleh Sucipto et al. (2022) menemukan bahwa sistem beroperasi dengan baik dan layak digunakan, ditunjukkan dengan hasil interpretasi skala Likert mencapai 84,21%. Persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada aplikasi sistem informasi, tetapi perbedaannya terletak pada konteks penerapannya. Penelitian ini lebih menekankan sistem informasi kepegawaian perangkat desa daripada pengembangan sistem informasi pencatatan berbasis web, seperti yang lebih umum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Kepegawaian Perangkat Desa melalui SIPEDE Di Desa Terungwetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengetahui penerapan sistem kepegawaian desa melalui SIPEDE, peneliti menganalisis keberhasilan penerapan menggunakan teori dari Indrajit (2016) yang mempunyai 3 (tiga) indikator yaitu dukungan, kapasitas dan nilai. Indikator-indikator tersebut dapat

mengetahui pelaksanaan penerapan sistem kepegawaian perangkat Desa Terungwetan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ada. Teknik identifikasi informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yang merupakan pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk memilih informan secara selektif berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Sejumlah narasumber yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan SIPEDE, termasuk Pengurus SIPEDE, Kasi Pelayanan, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui model interaktif Miles & Huberman (1994), yang mencakup langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saidin, 2023; Alam et al., 2022). Pendekatan ini efektif untuk memahami dan menggambarkan data yang ditemukan dalam penelitian kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Pendukung

Dukungan merupakan faktor utama dalam penerapan e-Government. Karena dalam penerapannya instansi pemerintah memerlukan konsensus para pemimpin untuk mendukung penerapan tersebut. Support dalam Bahasa Indonesia berarti dukungan, dukungan atau bantuan dalam mengimplementasikan aplikasi. (Oktavya, 2015) juga memuat konsep dukungan pemerintah, khususnya: "Ketersediaan dan konsistensi merupakan dukungan besar untuk dapat memberikan pengembangan electronic government (e-Government) yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, dukungan Pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Jika Pemerintah tidak mendukung maka dipastikan electronic government (e-Government) tentu tidak akan dapat berjalan dengan lancar." Dukungan merupakan upaya seseorang, baik mental maupun fisik, untuk memotivasi orang lain dalam melakukan suatu kegiatan (Notoatmodjo, 2003). Dukungan yang diharapkan dalam bentuk berikut: (1.) Menyetujui kerangka e-Government, (2) Dialokasinya Sumber Daya, (3) Mensosialisasikan konsep e-Government.

Kesepakatan mengenai kerangka e-Government artinya sebelum terbentuk dan berkembangnya e-Government harus disepakati oleh semua pihak yang ada. Pentingnya kebijakan-kebijakan yang disepakati dalam pengembangan e-Government. Kebijakan-kebijakan ini adalah langkah awal yang penting dalam inisiatif pengembangan e-Government, karena mereka menentukan arah dan

panduan bagi para penyelenggara negara. Kebijakan-kebijakan tersebut harus dirancang agar mudah dipahami, mudah diimplementasikan, dan sesuai dengan instruksi yang berlaku saat ini. Dengan demikian, mereka membentuk kerangka kerja yang jelas dan efektif untuk mendukung perkembangan e-Government dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Maskur sebagai operator SIPEDE sebagai berikut:

“Dari Pemerintahan kabupaten sidoarjo sangat mendukung layanan berbasis e-Government dengan sangat baik. Prioritas yang diberikan kepada Dinas PMD dalam pendataan dan dukungan terhadap Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi operator desa adalah langkah yang bijak. Bimbingan Teknis yang dilakukan di setiap kecamatan dan kabupaten membantu meningkatkan pemahaman operator, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program e-Government. Dukungan penuh dari pemerintah dan investasi dalam pelatihan dan pemahaman teknis adalah kunci untuk sukses dalam menerapkan inisiatif e-Government.”(Hasil Wawancara 24 Agustus 2023)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Tarlin sebagai kepala desa sebagai berikut:

“Dari pihak desa kami mendukung pelayanan yang berbasis e-government ini dengan memberikan support dengan fasilitas, sumber daya manusia yang kompeten, dan juga anggaran dan pemerintah kabupaten sidoarjo juga mendukung dengan adanya undang-undang yang telah ditetapkan untuk menuju smart city sidoarjo, tak hanya dari pemerintahan sidoarjo saja akan tetapi mendapat dukungan juga dari pihak dinas pmd dengan adanya sosialisasi dan monev yang dimana monev tersebut dilakukan selama 3 bulan sekali.” (Hasil Wawancara 24 Agustus 2023)

Tentunya dalam pelaksanaan dan penerapan program SIPEDE di Kantor Desa Terungwetan sangat mendukung keberadaan layanan berbasis e-Government, Kantor Desa Terungwetan Kecamatan Krian memberikan prioritas tinggi pada sistem kepegawaian perangkat desa melalui SIPEDE dengan meningkatkan kemampuan operator di bidang IT dengan mengikuti bimbingan teknis dari kecamatan dan kabupaten yang dilanjutkan dengan dukungan dan persetujuan langsung dari Bupati Sidoarjo khususnya dengan dukungan banyak pihak. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018, yang mendukung perkembangan e-Government dan pengelolaan teknologi dan komunikasi menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo (Kementrian Desa, 2016) . Selain itu, dukungan dari pihak pusat dan kabupaten dalam meningkatkan pemahaman operator tentang proses pengimputan data ke dalam WEB SIPEDE melalui Bimbingan Teknis di kecamatan-kecamatan dan kabupaten adalah langkah yang positif dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan SIPEDE. Semua ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menerapkan e-Government dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan menuju Smart City. Dukungan ini adalah langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dukungan pemerintah, terutama dari atasan, merupakan faktor penting dalam kesuksesan SIPEDE. Kepedulian dan dukungan dari pihak atasan menjadi sumber semangat dan landasan untuk kesuksesan program ini.

Sumber daya yang dimaksud dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, waktu, dan informasi. Sumber daya manusia mencakup tenaga pengelola aplikasi, sumber daya keuangan mencakup alokasi dana anggaran, dan sumber waktu serta informasi terkait dengan pengelolaan SIPEDE.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Saikul sebagai sekretaris desa sebagai berikut:

"Dari segi sumber daya kami lebih memfokuskan untuk memilih Operator yang betul-betul bisa mengoperasikan Komputer, kami juga memberikan dan anggaran yang berasal dari APBDES sebagai penunjang keberhasilan program tersebut. Kami juga meminta hanya satu operator saja dalam mengaplikasikan sipede ini dalam segi waktu saya harapkan bisa mengupdate data pegawai sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh Dinas PMD."(Hasil Wawancara 24 Agustus 2023)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Maskur sebagai operator sebagai berikut:

"Iya betul, dari pihak desa kami memang benar telah memilih operator yang benar-benar bisa dalam teknologi informasi contohnya saya, saya ditunjuk menjadi operator karena jurusan saya juga ada di jurusan computer bisa memahami teknologi dengan baik dari pada perangkat desa yang lain dan juga mendapatkan anggaran untuk penunjang fasilitas pendukung."(Hasil Wawancara 24 Agustus 2023)

Dikatakan program tersebut telah berjalan baik dengan ditunjuknya para pemegang operator yang mempunyai keahlian di bidang IT. Terbukti setelah menunjuk operator yang benar-benar menguasai teknologi, kualitas sumber daya manusia semakin meningkat dan nilai data pun meningkat.

Sumber keuangan mulai dari jaringan komputer dan Listrik juga dialokasikan dari Dana APBDES dengan anggaran sekitar Rp 600.000 per bulan. Sementara itu, mengingat sumber daya waktu dalam menyiapkan pencatatan, maka waktu yang dihabiskan karyawan untuk mengisi data dapat diselesaikan kapan saja, dengan cepat dan efektif.

Penyebaran informasi massa jelas memerlukan kegiatan sosialisasi, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menyebarkan informasi yang ingin disampaikan atau informasi yang perlu diketahui masyarakat. Perkembangan e-Government di Kantor Desa Terungwetan tidak lepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran aparat desa agar memahami pentingnya perbaikan data atau proses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maskur selaku operator Sipede sebagai berikut:

"Terkait sosialisasi tentang SIPEDE dari pihak Dinas PMD dengan memberikan arahan kepada setiap lurah atau kepala desa setempat untuk mengundang perangkat desa untuk melakukan bimbingan teknis SIPEDE, kami juga mengarahkan admin yakni operator itu sendiri untuk mengoperasikan SIPEDE ini."(Hasil Wawancara 24 Agustus 2023)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Tarlin sebagai kepala desa sebagai berikut:

“Benar, biasanya aka nada undangan yang dikirm kepada yang ditunjuk sebagai operator untuk melakukan sosialisasi biasanya kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di kecamatan atau kabupaten. Bila terdapat surat saya akan mengutus operator sipede untuk ikut acara sosialisasi sipede.”(Hasil Wawancara 24 Agustus 2023)

Berikut adalah gambar dari kegiatan sosialisasi SIPEDE yang dilakukan:

Gambar 1. Sosialisasi SIPEDE



Sumber: Pemerintah Terungwetan 2023

Perlu diketahui bahwa salah satu faktor keberhasilan program SIPEDE adalah kegigihan pemerintah dalam mensosialisasikan program tersebut untuk memudahkan pendataan kepada perangkat desa sehingga Kementerian Desa juga dapat memahami pentingnya melakukan pendataan tersebut. Dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo terhadap pengembangan aplikasi e-Government melalui program SIPEDE dinilai sangat baik, dukungan yang diberikan cukup signifikan, seperti pelatihan, pemberian dana yang cukup serta pemberian fasilitas yang menunjang operator sehingga memecahkan permasalahan yang ada dan menjamin keberhasilan program.

Kajian terhadap indikator pendukung mempunyai tiga sub variabel, yaitu disetujuinya kerangka e-Government, alokasi sumber daya tertentu, dan sosialisasi konsep e-Government secara menyeluruh, berkesinambungan, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Shafira et al., 2023) bahwa dari segi dukungan, dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk kemauan politik telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan adanya peraturan pusat dan daerah sebagai landasan pembentukan SPBE bagi warga dan pejabat dukungan berupa penyelenggaraan BIMTEK dan program online untuk meningkatkan efisiensi produktivitas pegawai. Namun bentuk dukungan finansial dan fasilitas yang diberikan belum bisa dianggap cukup. Masih terdapat kekurangan seperti fasilitas pelayanan (website) yang perlu ditingkatkan dan tambahan pendanaan sangat diperlukan, sehingga efisiensi operasional pelayanan yang diberikan tidak optimal.

2. Kapasitas

Pendapat dari (Indrajit, 2016) mengenai kapasitas dalam konteks pengembangan e-Government sangat relevan. Kapasitas mencakup ketersediaan

sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mewujudkan konsep e-Government. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan e-Government sangat bergantung pada kapasitas yang memadai, termasuk sumber daya keuangan, infrastruktur teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program operasional e-Government. Dengan adanya kapasitas yang memadai, pemerintah akan lebih mampu merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan program e-Government dengan efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya melalui pelayanan publik yang lebih baik dan efisien. Hal ini, menurut Darumurti jelas menunjukkan bahwa “aspek penting yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta organisasi dan manajemen”. Dalam upaya pengembangan e-Government di Kantor Desa Terungwetan Kecamatan Krian dicapai melalui tiga elemen minimal yang harus dimiliki pemerintah setidaknya terkait dengan faktor keberhasilan tersebut, yaitu:

Ketersediaan sumber daya keuangan disini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan membangun dan mengembangkan e-Government, karena faktor keuangan sangat menentukan penggunaan sumber daya lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Saikul sebagai sekertaris desa sebagai berikut:

“Kalau untuk anggaran dalam penerapan sipede dari pihak dinas pmd maupun kabupaten tidak memberikan akanggaran akan tetapi dari pihak desa sudah memfasilitasi komputer dan lain-lainnya yang berasal dari uang APBDES.”(Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Tarlin sebagai kepala desa sebagai berikut:

“Iya, pemerintahan desa tidak mendapatkan anggaran dalam penunjang fasilitas penggunaan sipede, akan tetapi kami telah menyediakan beberapa komputer dan yang lain-lainnya dengan menggunakan uang anggaran APBDES.”(Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)

Berikut adalah data anggaran yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan.

Tabel 1. Data Anggaran Penunjang SIPEDE

Listrik	RP. 250.000
Wifi	RP. 250.000

Sumber: Pemerintah Terungwetan 2023

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa dari segi sumber daya keuangan, tidak ada anggaran dari Otoritas PMD maupun Otoritas Pengatur untuk operasional SIPEDE. Anggaran yang disediakan pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan Sipede berasal dari APBES yang setiap bulannya digunakan untuk membayar jaringan, listrik dan lain-lain. Jika melihat datanya, kita dapat menyimpulkan bahwa anggaran sekitar Rp 600.000 digunakan untuk mendukung implementasi e-Government ini. Pendanaan berasal dari anggaran Desa atau APBEDS.

Menurut hasil penelitian dan kajian Harvard JFK School of Government, ketersediaan infrastruktur teknologi harus mencapai 50% dari perkembangannya. Karena semakin banyak infrastruktur teknologi maka implementasinya akan

semakin baik. Sebab jika infrastruktur teknologinya sedikit maka implementasinya akan menjadi tidak efektif, karena implementasi e-Government yang bermakna memerlukan infrastruktur teknologi dalam jumlah besar. Berkembangnya manajemen elektronik pada organisasi, selain meningkatkan penggunaan sistem informasi yang ada, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan menjadikan pengelolaan pemerintahan menjadi lebih efisien. Selain memiliki pemimpin yang berkemampuan e-leadership.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Maskur sebagai operator sipede sebagai berikut:

"Dalam segi infrastruktur teknologi informasi pemerintah desa kami sudah menyediakan jaringan internet, komputer dan penunjang lainnya yang telah disediakan. Jika terjadi kerusakan pihak pemerintah desa akan memperbaikinya." (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Tarlin sebagai kepala desa sebagai berikut:

"Memang benar dalam penerapan ini kami dari pihak pemerintah desa telah memberikan fasilitas teknologi informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan kami juga telah menyediakan tempat untuk kegiatan operator tersebut berlangsung." (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)

Tabel 2. Data Infrastruktur Teknologi Informasi

Komputer	2 unit
Wifi	1 unit dengan kapasitas 350mb
Listrik	1 unit dengan kapasitas 900 wat
CPU	2 unit

Sumber: Pemerintahan Desa Terungwetan 2023

Berdasarkan data tabel 2 dan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi informasi pada Pemerintahan Desa Terungwetan sangat sesuai untuk implementasi Sipede, dimana ketersediaan infrastruktur Teknologi menyumbang 50% kunci keberhasilan implementasi layanan online atau e-Government. Jika dilihat dari data pendukung, fasilitas IT sudah sangat lengkap dan siap digunakan.

Pada dasarnya sumber daya manusia diperlukan untuk mengoperasikan atau menggunakan teknologi informasi yang tersedia. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam suatu sistem yang matang sangat penting karena mereka bertanggung jawab dalam mengelola, meningkatkan, dan mengembangkan e-Government. Keberadaan SDM yang kompeten berarti bahwa orang yang mengelola kebutuhan tersebut harus memiliki kompetensi yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Saikul sebagai sekertaris desa sebagai berikut:

"Dari pihak Dinas PMD dan kabupaten meminta agar yang menjadi seorang operator ialah orang yang benar-benar paham dibidang IT dan juga kami akan meningkatkan kemampuan setiap operator dengan ikut bimbingan teknis (BIMTEK) yang biasanya diselenggarakan di kecamatan maupun kabupaten." (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Mawaliyatul sebagai kasi pelayanan sebagai berikut:

"Pihak desa sudah menetapkan bahwa yang menjadi operator adalah orang yang ahli dalam bidang IT agar tidak ada kesalahan yang fatal bila kami memilih orang yang tidak berkompeten." (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Terungwetan dan perangkat Desa Terungwetan yang bertanggung jawab terhadap informasi SIPEDE, dapat dilihat bahwa kesuksesan e-Government sangat tergantung pada kualitas personel. Oleh karena itu, pemerintah berfokus pada pemilihan operator yang memiliki kemampuan menggunakan komputer, dan memberikan pelatihan terkait proses pendataan dan pengisian data SIPEDE, yang secara langsung meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia di seluruh kabupaten Sidoarjo. Setelah melalui berbagai pelatihan, operator tidak lagi mengalami kesulitan saat memasukkan data. Kapasitas atau ketersediaan sumber daya untuk pengembangan e-Government di Kabupaten Sidoarjo, terutama sumber daya manusia dan keuangan, dianggap sangat baik. Staf operasional telah dilatih dengan pengetahuan dan keterampilan yang disediakan oleh Pusat Layanan PMD. Selain itu, proyeksi anggaran yang sesuai telah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah data perangkat desa yang berkompetain

Tabel 3. Data Pegawai Berkompeten

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1.	M.Maskurullah, S.Kom	Kaur Keuangan	Operator SIPEDE
2.	Mawaliyatul Maulidah, S.pd	Kasi Pelayanan	Operator SIPRAJA

Sumber: Pemerintah Desa Terungwetan 2023

Berdasarkan data tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa sangat sedikit sumber daya manusia yang berkompeten di Pemerintahan Desa Terungwetan yang tidak memiliki keahlian di bidang teknologi dan informasi. Oleh karena itu, penyelenggara penunjukannya adalah orang-orang yang berkompeten di sehingga penerapan e-Government dapat terlaksana secara maksimal meskipun terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten. Berdasarkan hasil wawancara, staf operasional direkrut berdasarkan kualifikasi pendidikan lulusan terkait sistem informasi dan teknologi. Proses pelatihan, demonstrasi dan evaluasi telah dilakukan selama lima tahun, banyak sekali perkembangan yang ditemui, artinya operator sudah sangat paham cara mengoperasikan SIPEDE.

Indeks kapasitas yang sedang diteliti terdiri dari tiga sub-variabel, yakni ketersediaan sumber daya keuangan untuk mendukung berbagai inisiatif e-Government, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian. sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ramadhania

& Sutisna, 2023) bahwa faktor kapasitas dalam mengimplementasikan adalah anggaran yang digunakan bersumber dari APBD, memiliki sumber daya manusia yang cukup, melakukan rekrutmen ketat untuk menyeleksi calon tenaga ahli, serta elemen infrastruktur.

3. Adaptasi

Menurut (Indrajit, 2016), faktor nilai atau manfaat adalah elemen penting dalam keberhasilan penerapan e-Government. Pemerintah dan penyedia layanan e-Government harus dapat memahami bahwa tujuan utama e-Government adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dalam hal kenyamanan, efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan akan menjadi faktor penentu kesuksesan e-Government. Dalam konteks ini, penting untuk memahami perspektif masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam merancang dan mengimplementasikan solusi e-Government, pemerintah harus memastikan bahwa inisiatif tersebut akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat, seperti penghematan waktu, biaya, atau peningkatan kualitas layanan. Masyarakat juga harus merasa bahwa penggunaan layanan e-Government adalah lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Kemampuan pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat tentang manfaat dan nilai yang diberikan oleh e-Government akan mempengaruhi tingkat adopsi dan penerimaan e-Government oleh masyarakat. Kunci keberhasilan penerapan e-Government adalah faktor nilai. Oleh karena itu, pemerintah harus selektif dalam memilih jenis aplikasi e-Government yang akan dikembangkan, sehingga memberikan manfaat yang bermakna kepada masyarakat. Penerapan e-Government memberikan manfaat utama dalam layanan pendataan perangkat desa melalui SIPEDE, yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Evaluasi implementasi e-Government dalam pendataan perangkat desa difokuskan pada manfaat yang diperoleh perangkat desa melalui SIPEDE. Dalam proses ini, aparat bertugas menyediakan data awal untuk direkam dengan cermat oleh aparat desa sesuai dengan situasi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Mawaliyatul sebagai kasi pelayanan sebagai berikut:

“Kalau manfaatnya bagi perangkat desa itu sangat banyak, ketika perangkat desa sudah terdata dalam pendataan ini, sudah masuk dalam data yang telah disediakan, dimana nantinya data tersebut akan dimanfaatkan untuk pengusulan kenaikan gaji, tunjangan dan lain-lain dan juga tidak perlu datang ke dinas pmd untuk laporan.” (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Tarlin sebagai kepala desa sebagai berikut:

“Benar dengan adanya pembaruan dalam input data pegawai perangkat desa ini sangat membantu bagi pegawai yang lain dan juga tidak perlu menghabiskan waktu untuk memberikan laporan secara langsung ke Dinas PMD dengan adanya ini membuat kinerja pegawai perangkat desa tidak terhambat dan lebih efisien dalam waktu.” (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIPEDE, manfaat program SIPEDE sangat penting bagi kepala desa. Dengan adanya program ini, pengelola

desa tidak perlu repot memasukkan data pegawai secara manual, cukup masuk ke SIPEDE dan masukkan data berdasarkan data tersebut menyediakan. Hal menarik atau kelebihan SIPEDE adalah tidak menya-nyiakan waktu kerja perangkat desa dengan membuat laporan setiap 3 bulan sekali. Dengan SIPEDE, pembuatan laporan sebulan sekali saja sudah cukup tanpa melalui layanan PMD Sidoarjo.

Kajian indeks manfaat (nilai) ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Surya Gilang Ananda, 2023) bahwa penerapan aplikasi memungkinkan pegawai dan masyarakat memberikan layanan survei kepuasan masyarakat dengan mudah dan fleksibel.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengakui pentingnya konsep e-Government dalam mengembangkan daerah Sidoarjo. Dalam upaya sosialisasi, Dinas PMD telah melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan. Mengenai kapasitas (Capacity), telah digunakan anggaran dari APBDes untuk implementasi SIPEDE, dan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan yang telah disediakan. Dari segi sumber daya manusia (Support), Perangkat Desa memiliki jumlah dan kompetensi yang memadai dengan sembilan pegawai. Mengenai elemen nilai (value), perangkat desa merasakan beberapa manfaat dari SIPEDE, seperti peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam layanan publik serta kemampuan untuk melaporkan kinerja mereka. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan SIPEDE, terutama berkaitan dengan kurangnya penginputan data oleh petugas operator. Perbaikan yang berkelanjutan dalam hal pelatihan dan dukungan teknis kepada petugas operator akan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penuh dari sistem SIPEDE di Kabupaten Sidoarjo.

Referensi

- Alam, S., Al Putra, F., & La Ode Mustafa, R. (2022). STRATEGI PEMBANGUNAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INOVASI DAERAH DI SULAWESI TENGGARA. *Journal Publicuho*, 5(4), 1277-1293.
- H, F. (2021). Penerapan Sistem Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Pendidikan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 606–618. <https://doi.org/10.36312/jime.v7i3.2324>
- Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. *Electronic Government*, 84.
- Jogiyanto, H. M. (2005). Analisis dan desain sistem informasi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kementrian Desa. (2016). *Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1433–1447.
- Ramadhania, A., & Sutisna, J. (2023). Penerapan E-Government Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022. 5(1), 29–48.
- Saidin, S., & Rinanda, W. W. (2022). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 178-190.
- Shafira, A. N., Rudiana, R., & Akbar, I. (2023). PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA SITUS WEB “PERMEN MANIS” DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2021. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 3(1), 130–143.
- Sucipto, A., Jupriyadi, J., Nurkholis, A., Budiman, A., Pasha, D., Firmansyah, G., & Sangha, Z. K. (2022). Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i1.1512>
- Sudirman, F. A. (2023). TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DAN SDGS: REVIEW LITERATUR SISTEMATIS. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 8(2), 273-288.
- Sugeng, A. H. N., Muchsin, S., & Hayat, H. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM SI PERLU (SISTEM INFORMASI PRESENSI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG) DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI (Studi Kebijakan Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang). *Jurnal Respon Publik*, 15(7), 69–75.
- Surya Gilang Ananda. (2023). Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penerapan E-SKM Pada Pelayanan Perusahaan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*.
- Watrianthos, R., Nasution, A. P., & Syaifullah, M. (2019). MODEL e-GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 17(1), 53–60. <https://doi.org/10.34010/miu.v17i1.2239>